

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS**

**2.1 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

**2.1.1 Tenaga Kerja**

**2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Sukirno (2000:53) dalam (Sulastri, 2021) istilah *employment* dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi *employment* berarti keadaan seseorang yang sedang mempunyai pekerjaan.

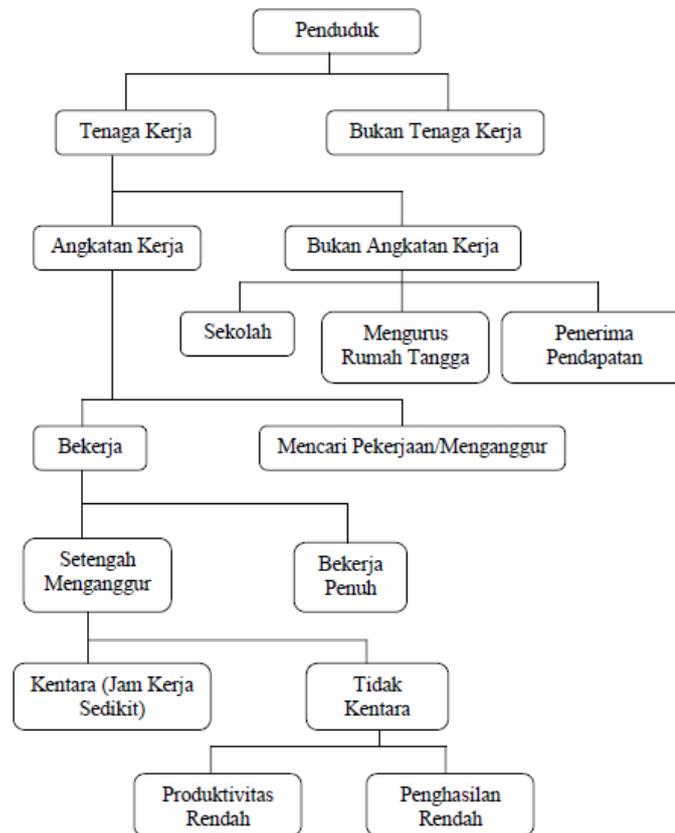
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan

dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja. Menurut Boediono (1992) dalam (Furqon, 2014) menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya.

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu industri karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan industri dipengaruhi oleh tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini tenaga kerja dalam pengembangan usaha harus diperhatikan dan diperhitungkan ketersediaannya baik kuantitas maupun keterampilan kerja (Assauri, 1999) dalam (Amin, 2015).

#### **2.1.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja**

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja di Indonesia dibedakan menurut umur. Di Indonesia berdasarkan pengertian sensus penduduk dipilih batas-batas umur minimum 15 tahun ke atas. Pemilihan batas umur 15 tahun berdasarkan kenyataan bahwa paada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 1985) dalam (Wicaksono, 2010).



Sumber: Payaman Simanjuntak, 1985 h.15 dalam (Wicaksono, 2010)

**Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja**

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari:

- a. Golongan yang bekerja
- b. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan

Sedangkan yang bukan angkatan kerja terdiri dari:

- a. Golongan yang bersekolah
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga
- c. Golongan-golongan lain atau penerima pendapatan

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial *labor force* (Payaman Simanjuntak, 1985) dalam (Wicaksono, 2010).

### **2.1.1.3 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sumarsono, 2003) dalam (Purnamawati & Khoirudin, 2019).

Menurut Todaro, 2003 dalam (Latipah, 2017) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Menurut Kuncoro (2002) dalam (Rohman, 2021) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

### **2.1.1.4 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja**

Dalam pasar kerja terdapat permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labor*) pada tingkat upah tertentu. Adapun yang

dimaksud permintaan tenaga kerja adalah kebutuhannya yang sudah di dasarkan atas ketersediaan membayar upah tertentu sebagai imbalannya. Jadi dalam permintaan tenaga kerja di sini sudah ikut dipertimbangkan tinggi rendahnya upah yang berlaku di masyarakat, atau yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Tingkat permintaan tersebut ditentukan oleh daya beli konsumen, pembeli modal dan pemerintah, serta seberapa besar mereka akan menggunakan daya belinya (Suroto, 1992) dalam (Rohman, 2021).

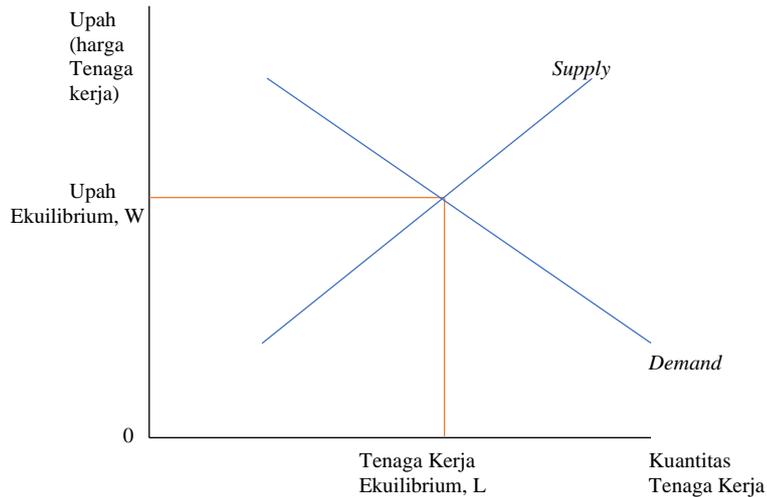
Permintaan pada perusahaan terhadap tenaga kerja *derived demand* berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang atau konsumen membeli suatu barang karena barang tersebut memberikan nikmat atau *utility* kepada konsumen. Akan tetapi pengusaha atau perusahaan mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat (konsumen). Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha atau perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari tingkat pertambahan permintaan konsumen atau masyarakat terhadap barang maupun jasa yang diproduksinya (Simanjuntak, 1998) dalam (Rohman, 2021).

Besaran tingkat permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh bertambahnya atau tumbuhnya jumlah total pekerjaan yang tersedia dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis pekerjaan itu sendiri. Apabila semakin tinggi atau semakin banyak lapangan pekerjaan maka akan semakin meningkat permintaan akan tenaga kerja. Jika dilihat dari segi jenis pekerjaannya peningkatan permintaan tenaga kerja akan meningkat apabila di suatu pekerjaan tersebut mengalami kenaikan jumlah

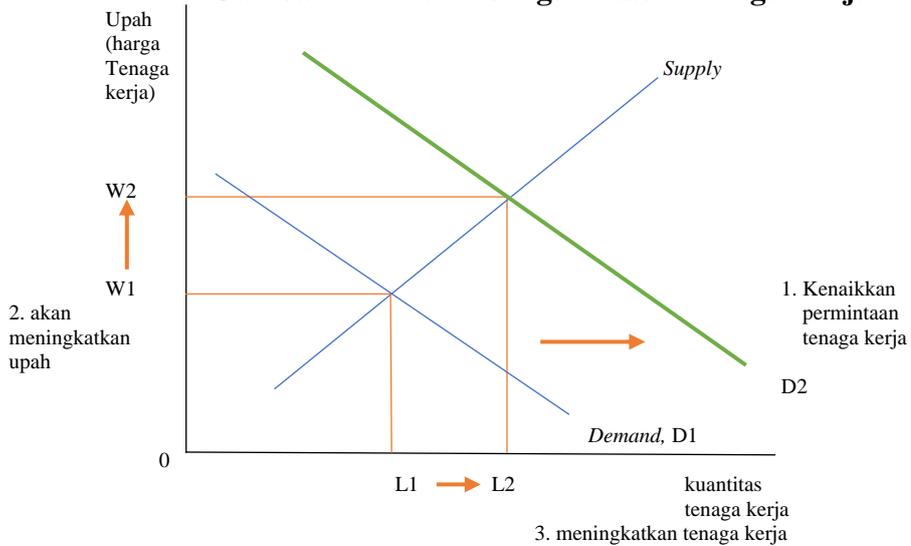
produksi yang diinginkan perusahaan tersebut, sehingga akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Berbeda dengan penawaran tenaga kerja yang muncul dari *trade off* masing-masing individu antara bekerja dan bersantai. Di kehidupan masyarakat selalu mengalami *trade off*. Namun mungkin tidak ada *trade off* lain yang lebih ketara dan lebih penting dalam kehidupan manusia daripada *trade off* antara bekerja dan bersantai. Semakin panjang waktu yang digunakan untuk bekerja, maka semakin sedikit waktu luang yang dimiliki (Mankiw, 2003) dalam (Rohman, 2021). Penawaran tenaga kerja didefinisikan dengan jumlah orang yang tersedia dan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada tingkat upah tertentu. Jika dikaitkan dengan sektor ekonomi, penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga.

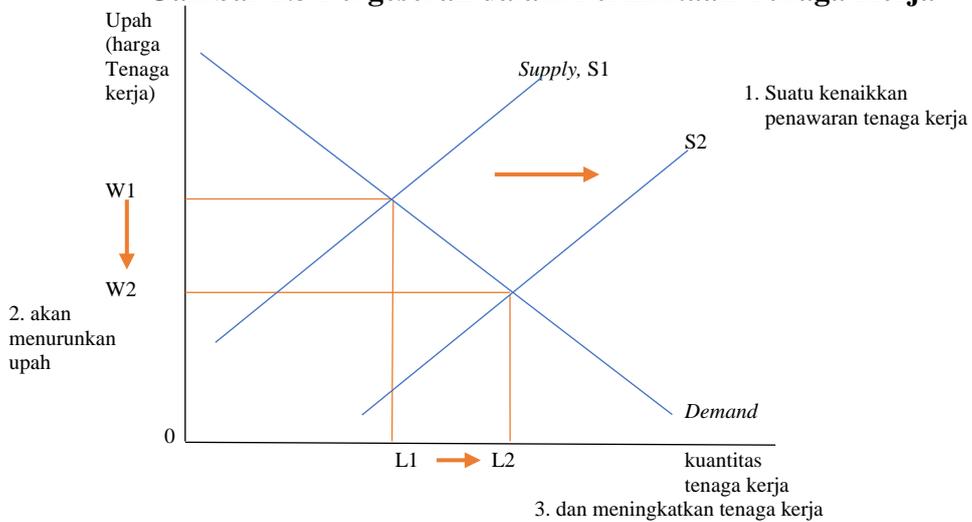
Dalam pasar barang dan jasa, apabila harga naik maka permintaan akan semakin sedikit, namun sebaliknya penawaran akan semakin banyak. Pada tingkat keseimbangan akan terbentuk jumlah permintaan yang sama dengan jumlah penawaran. Dalam pasar kerja, proses tersebut hampir sama, namun permintaan dan penawarannya berupa tenaga kerja dan harga barang/jasa menjadi tingkat upah. Oleh sebab itu upah sering disebut dengan harga tenaga kerja. Jika upah mengalami peningkatan, maka penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan menurun. Jika upah mengalami penurunan, maka penawaran tenaga kerja akan menurun, sebaliknya permintaan tenaga kerja semakin meningkat (Yasin & Ethicahwati, 2007). Keseimbangan pasar tenaga kerja serta pergeseran permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.2 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja**



**Gambar 2.3 Pergeseran dalam Permintaan Tenaga Kerja**



Sumber: Nicholson (1998) dalam Siregar & Tatan Suksiwa (2007)

**Gambar 2.4 Pergeseran dalam Penawaran Tenaga Kerja**

Menurut Nicholson (1998) dalam (Siregar & Tatan Suksiwa, 2007) keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kesesuaian tersebut bukan hanya dalam jumlah dan tingkat upah, tetapi juga implisit di dalamnya mengenai berbagai karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan pasar seperti keterampilan, pendidikan, dan sebagainya.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam hal produksi dan jasa, maka kualitas yang dimiliki haruslah baik untuk mendukung tingkat produksi maupun jasa yang lebih baik pula. Biasanya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja saat tingkat upah semakin naik, hal tersebut terjadi karena faktor substitusi. Misalnya di perusahaan memiliki karyawan dengan upah yang cukup tinggi namun kualitas dan perilaku yang dimiliki dapat merugikan karyawan tersebut karena terlalu bersantai sehingga mempengaruhi produktifitas di perusahaan.

#### **2.1.1.5 Teori Ketenagakerjaan**

##### **1. Teori Klasik Adam Smith**

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama aliran klasik. Adam Smith dalam (Sukarniati, 2019) telah mencurahkan perhatian pada alokasi sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Menurut teori klasik kondisi *full employment* akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (upah bersifat fleksibel). Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpotongan pada tingkat keseimbangan. Akhirnya sumbu yang dibuat teori klasik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pasar persaingan sempurna dan tiap industri terintegrasi secara vertikal.
- b. Tidak ada serikat buruh yang efektif.
- c. Terjaminnya mobilitas pekerja antar industri/perusahaan dan daerah.
- d. Tersedianya informasi lengkap dan bebas untuk semua pekerja.

(Ananta, Aris, 1990:330)

## **2. Teori Malthus**

Teori Robert Malthus (1766-1834) dalam (Sukarniati, 2019) juga merupakan salah satu tokoh aliran klasik. Bukunya yang sangat terkenal adalah *Principle of Population*. Walaupun Malthus seialiran dengan Adam Smith tetapi tidak semua pemikiran Adam Smith sejalan dengan pemikiran Malthus.

Adam Smith menganggap bahwa tingkat kesejahteraan manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi, namun sebaliknya Malthus pesimis dengan masa depan manusia. Malthus melihat bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi, luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebaian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan

bangunan lain. Di sisi lain jumlah manusia terus bertambah sehingga rata-rata produksi makanan yang tersedia semakin menurun, jumlah makanan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdampak pada perebutan makanan. Muncullah perang dan wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Penurunan jumlah penduduk menyebabkan makanan berlimpah lagi, penduduk meningkat lagi demikian seterusnya.

Malthus tidak percaya terhadap kemampuan teknologi dalam perlombaan dengan perkembangan jumlah penduduk. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi akan berakibat terhadap penurunan produksi per-kapita. Satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka tersebut adalah melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk, dengan pengendalian moral yaitu penundaan usia perkawinan, mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan persoalan akan diselesaikan dengan cara alami antara lain akan timbul perang, epidemic, kekurangan pangan, dan sebagainya.

### **3. Teori Keynes**

Pemikiran John Maynard Keynes (1936) dalam (Sukarniati, 2019) sebenarnya merupakan kelanjutan dan penajaman kritik Malthus terhadap Hukum Say. Menurut Keynes terjadinya depresi besar pada tahun 30-an adalah karena kurangnya permintaan agregatif di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya kegiatan produksi, walaupun

sebenarnya masyarakat mampu melakukannya, masyarakat banyak yang menganggur.

Salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek *aggregate demand* harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan *employment*. Multiplier-nya akan lebih besar jika peningkatan *aggregate demand* berasal dari peningkatan investasi sehingga dapat dikatakan *demand its own supply*. Dengan kata lain peningkatan permintaan akan meningkatkan *employment* hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan modal manusia.

## **2.1.2 Industri**

### **2.1.2.1 Pengertian Industri**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 2 industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan menurut (*Badan Pusat Statistik, n.d.*) industri merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya di mana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI)

Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang

mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 2004) dalam (Purnamawati & Khoirudin, 2019).

#### **2.1.2.2 Pengertian Industri Pengolahan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan.

Industri pengolahan diartikan sebagai kelompok perusahaan yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi suatu jenis barang jadi yang diproduksi dalam jumlah besar dan dijual ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Sebuah industri pengolahan tidak hanya berfungsi dalam proses produksi, ada beberapa fungsi lain untuk mendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang ada di masyarakat. Perusahaan industri pengolahan dibagi menjadi empat golongan yaitu:

- a. Industri besar (tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- b. Industri sedang (tenaga kerja 20-99 orang)
- c. Industri kecil (tenaga kerja 5-19 orang)
- d. Industri rumah (tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan tersebut.

Klasifikasi subsektor industri pengolahan dibagi menjadi:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
3. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
4. Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya
5. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman
6. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
7. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
8. Industri Barang Galian bukan Logam
9. Industri Logam Dasar
10. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik
11. Industri Alat Angkutan
12. Industri Pengolahan Lainnya

Industri pengolahan dipandang sebagai pendorong atau penggerak perekonomian suatu negara. Seperti umumnya negara berkembang, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di setiap daerahnya. Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang sangat tinggi. Sektor pengolahan menjadi media untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, yang pada gilirannya akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar (Suharto, 2009).

### 2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Industri

Teori Kaldorian menganggap bahwa sektor industri pengolahan merupakan mesin pertumbuhan bagi sebuah wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Kaldorian dalam (Mar'atus Sholihah et al., 2017) terdapat tiga aspek industri yang disorot yaitu: (1) pertumbuhan GDP memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan, (2) produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan industri pengolahan itu sendiri, dan (3) pertumbuhan sektor non-industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan industri sektor industri pengolahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan sektor non-industri pengolahan yang mengarah pada *diminishing return to scale*.

Teori pertumbuhan industri Kaldorian yang kedua menyebutkan bahwa *increasing to scale* hanya akan tercipta dengan akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Faktor investasi menjadi sorotan tersendiri dalam pengembangan teori, dikarenakan investasi mampu memberikan *manufacturing insentive* yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri. Sehingga dibutuhkan tingkat investasi yang tinggi untuk dapat memperbaharui mekanisme teknik dari produksi.

Arsyad (1992) dalam (Latipah, 2017) mengungkapkan sektor industri disebut sebagai *leading sector* atau sektor pemimpin. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi

industri. Sektor jasa juga turut berkembang dengan berdirinya lembaga keuangan, lembaga pemasaran, dan sebagainya, yang semuanya akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.

### **2.1.3 Produk Domestik Bruto (PDB)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu mesin paling tangguh untuk menghasilkan peningkatan jangka panjang standar hidup yang terjadi kepada standar hidup materi seseorang atau masyarakat yang bergantung pada pertumbuhan pendapatan nasional dengan diukur oleh PDB dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk (Lipsey, et al., 1999).

GDP atau PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. *Output* dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu di jumlahkan sebagai nilai GDP (Dornbusch dan Fischer, 1997) dalam (Wicaksono, 2010).

Dalam penelitian ini PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, yang merupakan PDB atas dasar harga berlaku yang tidak memperhitungkan pengaruh perubahan harga. Hal ini mengandung maksud bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan nilai yang masih mengandung perubahan harga.

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

PDB dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan, dan (3) pendekatan pengeluaran (Dumairy, 1997). Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar dipilih-pilih menjadi 11 sektor atau lapangan usaha (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) bank dan lembaga keuangan lainnya, (9) sewa rumah, (10) pemerintah, dan (11) jasa-jasa. Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha (Dumairy, 1997). Adapun menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga

yang tidak mencari keuntungan, (2) pembentukan modal tetap domestik bruto, (3) konsumsi pemerintah, serta (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor), dalam jangka waktu setahun.

PDB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi sembilan sektor ekonomi yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa.

#### **2.1.3.2 Teori Produksi pada Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Menurut Mankiw (2007;46), *output* barang dan jasa suatu perekonomian (GDP) bergantung pada (1) jumlah input atau faktor-faktor produksi dan (2) kemampuan mengubah input menjadi *output* sebagaimana ditunjukkan dalam fungsi produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja.

Perhitungan PDB dengan pendekatan produksi didasarkan pada fungsi *Cobb-Douglas*. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* menyatakan bahwa pendapatan

nasional yang dibagi diantara tenaga kerja dan modal adalah tetap konstan selama periode panjang. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* memiliki skala hasil konstan, yaitu jika tenaga kerja dan modal meningkat dalam proporsi yang sama, maka *output* akan meningkat menurut proporsi yang sama pula (Mankiw, 2007:55).

### 2.1.3.3 Metode dan Komponen Perhitungan Pengeluaran Produk Domestik

#### **Bruto (PDB)**

Salah satu metode perhitungan PDB yaitu dengan metode pengeluaran (*expenditure method*). Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu:

- a. Konsumsi rumah tangga/*Household Consumption* (C)
- b. Konsumsi pemerintah/*Government Consumption* (G)
- c. Pengeluaran investasi/*Expenditure investment* (I)
- d. Ekspor Neto/*Net Export* (X-M)

Metode perhitungan PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$\mathbf{PDB = C + G + I + (X-M)}$$

Di mana:

C: konsumsi rumah tangga

G: konsumsi/pengeluaran pemerintah

I: PMTB

X: ekspor

M: impor

Adapun penjelasan dari komponen perhitungan PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo satu tahun atau kurang (*durable goods*) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (*non-durable goods*).

b. Konsumsi Pemerintah (*Government Consumption*)

Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (*government expenditure*). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk ke dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).

c. Pembentukan Modal Tetap Produk Domestik Bruto (*Investment Expenditure*)

PMTDB merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila dihitung adalah investasi neto, yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan.

Perhitungan PMTDB ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru. Barang-barang tersebut merupakan *output* baru, karena itu harus dimasukkan dalam perhitungan PDB.

d. Ekspor Neto (*Net Export*)

Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari pada impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dilakukan apabila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

#### **2.1.4 Unit Usaha**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha pada suatu negara akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Perusahaan atau unit usaha industri merupakan suatu unit kesatuan yang melakukan kegiatan ekonomi dan bertujuan menghasilkan suatu barang atau jasa pada lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi berkaitan dengan barang atau jasa yang diproduksinya dan ada satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Jumlah unit usaha dalam industri sangat berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Jika semakin banyak unit usaha maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat pada sektor industri khususnya. Selain itu investasi

juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan jumlah unit usaha sektor industri, semakin banyak investasi pada unit usaha maka produksi barang atau jasa akan meningkat, hal ini akan menjadikan pengangguran semakin sedikit dengan kata lain meningkatnya jumlah tenaga kerja.

## **2.1.5 Inflasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Inflasi**

Menurut Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Veneris dan Sebol (1978:603) dalam (Siallagan, 2020), inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum yang terjadi dalam periode waktu secara terus menerus. Dalam hal ini, apabila terjadi kenaikan harga-harga hanya sekali waktu saja, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Akibat dari inflasi ini secara umum, menurunnya daya beli masyarakat karena tingkat pendapatannya juga menurun. Dari definisi tersebut dapat dipaparkan tiga penjelasan penting dalam inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan kenaikan harga-harga, yaitu menunjukkan tingkat harga yang terjadi dari waktu ke waktu mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.
2. Kenaikkan harga-harga berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
3. Definisi tingkat harga secara umum di sini yaitu tingkat harga yang mengalami peningkatan secara keseluruhan bukan hanya satu jenis komoditi, tetapi barang dan jasa itu banyak jumlah dan jenisnya.

### 2.1.5.2 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Nopirin (1987:27), jenis-jenis inflasi terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### 1. Inflasi menurut Sifatnya

- a. Inflasi merayap (*creeping inflation*), yaitu tingkat inflasi yang rendah kurang dari 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan dengan lambat dalam jangka yang relatif lama dengan presentase yang kecil.
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*), yaitu tingkat inflasi yang cukup besar. Angka inflasi ini ditandai dengan 2 digit maupun 3 digit, seperti 10%, 16%, 21%, dan sebagainya. Dalam kondisi ini harga-harga dalam bulan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya.
- c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang paling parah, mengakibatkan harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjakan dengan mencetak uang.

#### 2. Inflasi menurut Sebabnya

##### a. *Demand Pull Inflation*

Jenis inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Hal ini menyebabkan inflasi terjadi akibat adanya sekelompok masyarakat lebih banyak memanfaatkan barang dan jasa, sehingga permintaan bertambah, sedangkan penawaran masih tetap dan akhirnya harga menjadi naik. Dalam hal ini inflasi

terjadi karena tarikan permintaan yaitu, besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang, sehingga memicu perubahan tingkat harga naik. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena kenaikan permintaan total yang disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar.

b. *Cost Pull Inflation*

Jenis inflasi ini disebabkan adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Kelangkaan produksi terjadi karena adanya ketidaklancaran aliran distribusi atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal yang dapat memicu kenaikan harga

### **2.1.5.3 Dampak Inflasi**

Secara khusus dampak negatif dan positif dari inflasi adalah sebagai berikut:

1. Dampak Negatif
  - a. Apabila harga barang secara umum naik, maka masyarakat akan panik, sebagai akibat dari kepanikan tersebut masyarakat cenderung menarik tabungan untuk membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank kekurangan dana dan rendahnya dana investasi yang tersedia.
  - b. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.

- c. Apabila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif mahal, sehingga para konsumen tidak dapat membeli.

## 2. Dampak Positif

- a. Pengusaha barang-barang mewah produknya lebih laku pada saat harganya tinggi.
- b. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, sehingga perilaku konsumtif dapat dikurangi.
- c. Tingkat pengangguran cenderung akan turun karena masyarakat bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara membuka usaha

### **2.1.5.4 Kebijakan Mengatasi Inflasi**

#### 1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dapat dilalui dengan mengatur jumlah uang beredar (M). Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Dalam menekan laju inflasi cadangan minimum akan dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Bank sentral menggunakan tingkat *discount rate*, yaitu tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. *Discount rate* bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral. Apabila tingkat *discount rate* dinaikkan maka bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan pada bank sentral akan mengecil juga. Oleh sebab itu, kemampuan bank

umum memberikan pinjaman pada masyarakat semakin kecil sehingga jumlah uang yang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. Selain itu dalam mencegah inflasi adanya politik pasar terbuka (jual atau beli surat berharga). Dengan menjual surat berharga, maka bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengenai pengeluaran pemerintah serta perpajakan secara langsung mempengaruhi permintaan total sehingga dapat mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

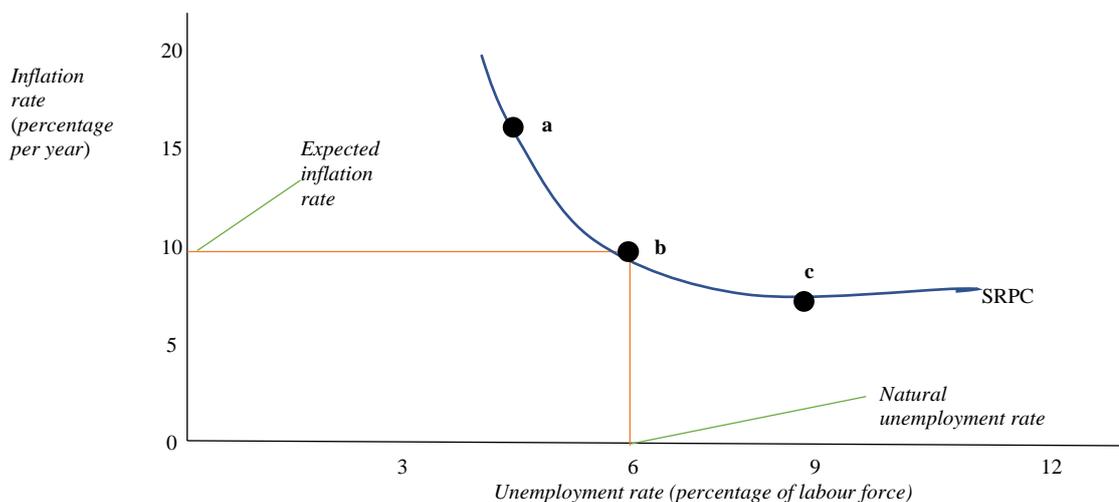
## 3. Kebijakan yang berkaitan dengan *output*

Kenaikkan *output* akan memperkecil laju inflasi. Kenaikkan jumlah *output* dapat dicapai dengan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

### **2.1.5.5 Kurva Phillips**

Hubungan terbalik (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi. Dalam hal ini pengangguran sebagai *output* dan menerjemahkan

inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi di mana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai *stagflasi*. Adapun gambar kurva Phillips adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.5 Kurva Phillips**

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan *output*). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Pergeseran kurva Phillips dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut: Pada periode awal, pengangguran berada pada tingkat normal, tidak terdapat permintaan atau penawaran yang mencolok, selanjutnya pada periode

kedua peningkatan yang cepat pada *output* selama ekspansi ekonomi menurunkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya pengangguran, perusahaan cenderung merekrut pekerja lebih banyak lagi, memberikan peningkatan upah yang lebih besar dari biasanya. Saat *output* melebihi potensinya, utilitas kapasitas meningkat dan penggelembungan dana meningkat, upah dan harga mulai naik. Pada periode ketiga, dengan terjadinya inflasi maka perusahaan dan pekerja akan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi.

Namun sisi lain tingkat inflasi yang tinggi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian namun dalam jangka panjang kenaikan inflasi dapat memberikan dampak buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor akan naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam negeri. Produksi menjadi berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat.

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan yang menurun, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah atau sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan adanya *trade off* (hubungan negatif) antara inflasi dengan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran.

Namun yang terjadi di Indonesia, hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *trade off* melainkan berjalan searah. Artinya, inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja menurun. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat pada perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar di Provinsi Jawa Timur  (Latipah, 2017)	- Unit Usaha	- Upah Minimum - Nilai Produksi (Nilai <i>Output</i> ) - Investasi	Secara parsial unit usaha berpengaruh positif dan tidak signifikan, nilai produksi berpengaruh positif signifikan. Sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan, upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008  (Wicaksono, 2010)	- PDB - Jumlah Unit Usaha	- Upah Riil - Suku Bunga Riil	Secara parsial PDB dan upah riil berpengaruh positif dan signifikan sedangkan suku bunga riil dan jumlah unit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan PDB, upah riil, suku bunga riil, dan jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
3	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2017  (Perdana, 2016)	- Sektor Industri Manufaktur	- PDRB - Upah Minimum Provinsi - Pengeluaran Pemerintah	Secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan, investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Secara simultan PDRB, investasi, upah minimum provinsi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
4	Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik Tahun 1998-2012  (Furqon, 2014)	- Jumlah Unit Usaha	- PDRB - Upah Minimum - Investasi	Secara parsial PDRB dan jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif. Sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan, investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan PDRB, upah minimum, jumlah unit usaha, dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
5	Pengaruh Jumlah Perusahaan Industri, Investasi, dan Krisis	- Jumlah Perusahaan Industri	- Krisis Ekonomi - Investasi	Secara parsial jumlah perusahaan industri dan investasi berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekonomi terhadap Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Tekstil Menengah Besar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2018  (Fauziah et al., 2018)			signifikan dan positif. sedangkan krisis ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Secara simultan jumlah perusahaan industri, investasi, dan krisis ekonomi berpengaruh.
6	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Jawa Tengah 2011-2015  (Purnamawati & Khoirudin, 2019)	- Jumlah Unit Usaha	- Upah Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Secara parsial upah dan jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan sedangkan laju pertumbuhan sektor industri memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan upah, jumlah unit usaha, dan laju pertumbuhan sektor industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
7	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja	- Penyerapan Tenaga Kerja	- PDRB Upah Minimum	Secara parsial upah minimum dan PDRB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di Provinsi Jawa Tengah  (Alamsyah & Hasmarini, 2019)		- Data <i>Time Series</i>	berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan upah minimum, PDRB dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
8	Analisis Data Panel Pengaruh UMR, Nilai <i>Output</i> , Jumlah Unit Usaha, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor Industri Besar dan Sedang di Jawa tengah 2011-2013  (Jaunita, 2016)	- Unit Usaha	- UMR - Lokasi Penelitian - Nilai <i>Output</i> - Investasi	Secara parsial UMR dan investasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan, nilai <i>output</i> dan unit usaha memiliki hubungan positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan UMR, nilai <i>output</i> , unit usaha, dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
9	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	- Sektor Industri Manufaktur	- UMK - Pertumbuhan Ekonomi	Secara Parsial Pertumbuhan ekonomi dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Malang Tahun 2010-2018		Investasi	UMK memiliki hubungan negatif signifikan sedangkan investasi memiliki hubungan positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, UMK, dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
	(Ginting, 2020)			
10	Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur	- Inflasi	- PDRB - Upah Minimum	Secara parsial inflasi memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan sedangkan PDRB dan upah minimum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Secara simultan inflasi, PDRB, dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri.
	(Warapsari et al., 2020)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Besar & Sedang) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011  (Utami, 2020)	Sektor Industri Manufaktur	- Upah - Jumlah Industri - Biaya Input - Nilai <i>Output</i>	Secara parsial jumlah industri, upah, nilai <i>output</i> , dan biaya input berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan jumlah industri, upah, nilai <i>output</i> , dan biaya input berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
12	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (Besar dan Sedang) Kabupaten Deli Serdang  (Siregar, 2018)	- Sektor Industri Manufaktur	- Jumlah Industri - Jumlah Penduduk - Data <i>time series</i> - Nilai <i>Output</i>	Secara parsial jumlah industri dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan sedangkan nilai <i>output</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan jumlah industri, nilai <i>output</i> , dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia  (Rohman, 2021)	- Penyerapan Tenaga Kerja	- PDRB - Upah - Investasi	Secara parsial PDRB berpengaruh positif signifikan, investasi berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan upah dan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan PDRB, investasi, upah, dan inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
14	Pengaruh Upah Sektor Industri, Tingkat Pendidikan, dan Investasi Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Industri  (Adriani, 2020)	- Lokasi Penelitian	- Upah - Tingkat Pendidikan - Investasi Asing	Secara parsial upah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan, tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan investasi asing memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan upah sektor industri, tingkat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pendidikan, dan investasi asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
15	Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia  (Sholihah et al., 2017)	- Lokasi Penelitian	- Model Persamaan Simultan dengan metode <i>Two Stage Least Square</i> (2SLS) - Menggunakan 2 variabel Y dan 1 variabel X - Investasi	Investasi berpengaruh signifikan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan terhadap penyerapan tenaga kerja investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan.
16	Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara  (Amin, 2015)	- Penyerapan Tenaga Kerja	- Menggunakan analisis <i>Location Quotient</i> (LQ), <i>Multiplier Share</i> (MS), dan Elastisitas Tenaga Kerja	Peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian di provinsi Sulawesi utara relatif stabil dari tahun ke tahun tahun, dan ditinjau dari PDRB sektor industri pengolahan termasuk sektor non basis, untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk PDRB selain

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>tenaga kerja, yang bisa meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan. Sedangkan peran sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong kecil dan cenderung stabil setiap tahunnya, dilihat dari aspek tenaga kerja, sektor industri pengolahan termasuk sektor basis.</p>
17	<p>Pengaruh Upah, Investasi Swasta, dan Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Indonesia</p>	<p>- Sektor Industri Manufaktur</p>	<p>- Upah - Ekspor - Investasi</p>	<p>Upah minimum dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan, investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan secara simultan, upah minimum, investasi swasta, dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.</p>
	(Sulastri, 2021)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	<i>Quality, productivity and buseness performance in home based brassware manufacturing units</i>	- Manufaktur	- Penentuan Kualitas, Produktivitas, dan Kinerja Bisnis	Hasil penelitian ini yaitu berupa faktor penentu kualitas, produktivitas dan bisnis kinerja menggunakan area kinerja utama di unit manufaktur. Bagaimana mendefinisikan dan meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja bisnis untuk manufaktur peralatan kuningan rumahan.
	(Prasad, Kapil Deo, et all., 2015)			
19	Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru	- Inflasi	- Lokasi Penelitian - PDRB - Upah Minimum	Hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara simultan, inflasi, PDRB, dan upah minimum berpengaruh
	(Siallagan, 2020)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	<i>Does Cereal Crops Asymmetrically Affect Agriculture Gross Domestic Product in Pakistan Using NARDL Model Approach</i>	- PDB	- Menggunakan Model Non-linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) - Uji Kausalitas Granger	terhadap penyerapan tenaga kerja.  Hasil kointegrasi produksi beras, jagung, dan gandum berpengaruh positif dan signifikan terhadap AGDP. Pada hasil psotif asimetris dari tiga tanaman memiliki efek netral pada AGDP. Sedangkan oada hasil simetris menunjukkan pengaruh searah antara produksi beras, jagung, dan gandum tidak memiliki kausalitas ganger dengan AGDP. Terakhir, hasil menggambarkan bahwa produksi beras, jagung, dan gandum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB pertanian dalam kasus Pakistan
21	Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	- Inflasi	- PDRB - Upah Minimum	Secara parsial inflasi dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018  (Abdillah, 2019)			penyerapan tenaga kerja sementara upah minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara simultan, Inflasi, PDRB, dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara PDB, jumlah unit usaha, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Indonesia tahun 2013-2021.

### 2.2.1 Hubungan Produk Domestik Bruto dengan Penyerapan Tenaga Kerja

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB memiliki hubungan

yang positif dengan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDB meningkat, maka jumlah nilai tambah *output* dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Semakin besar *output* atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk dapat menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.

Menurut teori Keynes dalam (Alamsyah & Hasmarini, 2019) pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila *output* yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan *output* hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya.

Hubungan positif antara PDB dengan penyerapan tenaga kerja telah dibuktikan dalam penelitian (Wicaksono, 2010). Dalam penelitian tersebut menunjukkan PDB sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Apabila nilai PDB bertambah maka jumlah nilai *output* atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan bertambah. Meningkatnya nilai *output* atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan memajukan perusahaan untuk menaikkan jumlah tenaganya.

### **2.2.2 Hubungan Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Apabila terjadi peningkatan investasi pada suatu industri akan mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan apabila investasi meningkat maka jumlah unit usaha juga akan bertambah. Peningkatan

jumlah unit usaha ini akan meningkatkan *output* yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan mengurangi penangguran dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Tri Wahyuni Rejekiingsih (2004) dalam (Siregar, 2018), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit usaha menurun maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja.

### **2.2.3 Hubungan Inflasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Inflasi sebagai variabel makro ekonomi merupakan kenaikan harga barang-barang secara keseluruhan secara terus menerus (Nopirin, 1987:250) dalam (Siallagan, 2020). Dalam perekonomian, inflasi menyebabkan perubahan *output* dan tenaga kerja. Apabila inflasi tergolong ringan dapat mendorong semangat kerja produsen, karena kenaikan harga yang masih dapat dijangkau oleh konsumen. Keinginan perusahaan untuk menambah *output* dibarengi dengan penambahan faktor produksi yaitu tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini permintaan tenaga kerja meningkat, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Apabila inflasi tergolong berat (*hyper inflation*), yang menyebabkan seluruh biaya produksi mahal, sementara daya beli masyarakat semakin berkurang maka perusahaan akan mengurangi jumlah *output* akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran terus bertambah.

Dalam kondisi ini, tidak jarang perusahaan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga kesempatan untuk bekerja akan berkurang.

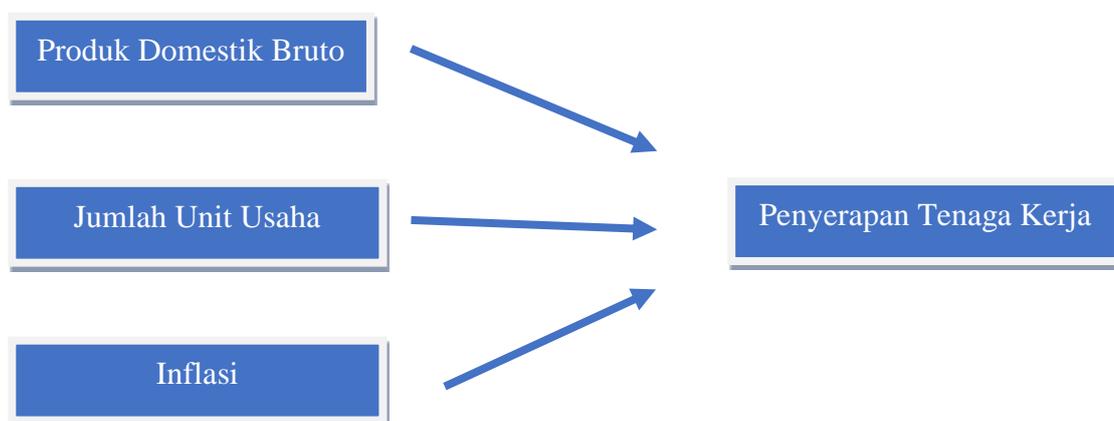
Kurva Phillips merupakan kurva yang mengilustrasikan *trade off* antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena adanya *trade off*. *Trade off* tersebut terjadi karena ketika tingkat pengangguran tinggi maka pekerja (buruh) tidak mempunyai daya tawar gaji yang tinggi, akibatnya biaya (upah) yang akan dibayarkan oleh pengusaha menjadi rendah sehingga dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya kenaikan harga produk yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran rendah artinya posisi tawar menawar tenaga kerja (buruh) menjadi lebih tinggi, sehingga pengusaha harus membayar lebih tinggi biaya upah atau gaji, kenaikan upah tersebut akan meningkatkan harga produk perusahaan.

Teori kurva phillips dijadikan acuan bagi para ekonom dalam menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara. Namun hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hal yang tidak bersesuaian dengan teori atau kurva phillips. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Filiphina tidak terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran. Kemudian hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian dari Hamidah (2010) yang menunjukkan bahwa *trade off* antara inflasi dan pengangguran di Indonesia terbukti tidak ada.

Melalui hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa variabel inflasi dan pengangguran di Indonesia memiliki hubungan yang positif dan

memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Maka dapat diartikan bahwa kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan pengendalian inflasi akan berdampak pada kegagalan dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran, begitupun sebaliknya kegagalan atau kesalahan dalam melaksanakan kebijakan penurunan tingkat pengangguran akan memiliki dampak terhadap keberhasilan upaya pengendalian inflasi

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, bahwa PDB, jumlah unit usaha, dan inflasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Secara jelasnya mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dari gambar 2.6.



**Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 HIPOTESIS**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDB dan jumlah unit usaha berpengaruh positif, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Indonesia tahun 2013-2021.
2. Diduga secara bersama-sama PDB, jumlah unit usaha, dan inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Indonesia tahun 2013-2021.